

## **KINERJA APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

**Febrianti Ningsih**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

Email : [www.febriantiningsih91@yahoo.co.id](mailto:www.febriantiningsih91@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Judul penelitian ini adalah Kinerja Aparat Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Adanya permasalahan pelayanan publik yang diberikan masih adanya kendala berupa kecepatan waktu, sikap terlambat dalam pelayanan administrasi serta sering tidak hadir beberapa aparatur pada saat jam-jam kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk di desa Entikong. Masih banyaknya masyarakat desa yang mengeluh mengenai kinerja dalam pelayanan yang diberikan di kantor desa, dan proses pemberian pelayanan dalam administrasi kependudukan agar terus dilakukan dan ditingkatkan demi mencapai kinerja pelayanan yang optimal. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, kinerja pelayanan publik mencakup 3 hal yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa aspirasi yang ditampung kurang cepat ditanggapi, pelayanan yang diberikan aparatur desa masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, serta masih dirasakan kurang konsisten dan kurang merespons apa yang menjadi masalah masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan aparat yang masih kurang dalam pengadaan dokumen, dan prosedur akan ditaati petugas bila masyarakat tidak mempunyai hubungan informal dengan aparat.

Kata kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas

### **Abstract**

*The title of this research is the Government Apparatus Performance in Public Service in the Office of Rural Entikong the District Entikong regency Sanggau. The existence of public service issues are still given the time constraints in the form of speed, attitude late in administrative services and often not present some apparatus during business hours. This study aims to explain the performance of government officials in the ministry of family cards and identity cards in the village Entikong. Still many villagers who complained about the performance of the services provided at the village office, and service delivery processes in population administration continued and increased in order to achieve optimal service performance. This study used a descriptive research model with data processing techniques of qualitative analysis. In this study, the performance of public service includes 3 things: responsiveness, responsibility, and accountability. The results of the data analysis showed that aspiration which is collected less quickly addressed, the service provided village officials are still deemed to be incompatible with the principles of correct administration, and still felt less consistent and less responding to what the community's problems and not in accordance with the applicable regulations. The conclusion of this study is the readiness of the apparatus that is still lacking in the procurement documents and procedures will be adhered to when public officials do not have an informal relationship with the authorities.*

*Key words: Performance, Public Service, Responsiveness, Responsibility, and Accountability*

## PENDAHULUAN

Kelahiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia, Undang-undang ini membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa beberapa perubahan mendasar yang memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah otonom yang selama ini dikenal sebagai daerah tingkat (dati) II, beberapa perubahan yang bisa didefinisikan diantaranya adalah undang-undang ini menempatkan pemerintah kecamatan dan desa sebagai perangkat daerah otonom, yaitu daerah kabupaten dan daerah kota. Tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu: Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan masyarakat, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Adanya masalah dalam pelayanan yang paling sering mengalami kendala pelayanan dalam hal distribusi atau pengadaan adalah pengantar kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP) antara lain: pelayanan administrasi yang diberikan masih ditemukan adanya kendala berupa kecepatan waktu, adanya sikap terlambat dalam pelayanan pembuatan KK dan KTP serta sering membolusnya beberapa oknum aparatur pada saat jam-jam kerja.

Dalam uraian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bagi peneliti ada hal yang menjadi fokus penelitian serta menarik untuk diteliti yaitu “Kinerja Pelayanan

Administrasi Kependudukan khususnya KK dan KTP Oleh Aparat Pemerintah Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau”. Perumusan masalah disajikan dengan maksud untuk memperjelas sasaran yang terdapat dalam penelitian ini, khususnya agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu perumusan masalah ini adalah Bagaimana Kinerja Aparat Pemerintah Desa Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Khususnya Pembuatan KK dan KTP Untuk Masyarakat Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis responsivitas aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui dan menganalisis responsibilitas aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara Teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat memahami permasalahan dalam kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan KK dan KTP serta dapat menjadi bahan bacaan atau referensi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat juga menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran kepada aparat pemerintah Desa Entikong dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada publik dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

## KAJIAN TEORI

Menurut Levine et al dalam Nasucha (2004:25) standar kinerja yang baik, dalam

upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi negara salah satunya, yaitu berupa produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil tiga aspek saja yakni Responsivitas adalah ukuran kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau konsistensi dengan kehendak masyarakat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Kinerja antara lain Evi Yanti (2010), Asra (2007), Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan pihak dari aparat pemerintah Desa Entikong kepada masyarakat belum memberikan pelayanan yang optimal, karena masih dijumpai kekurangan disana sini, hal ini lebih disebabkan kemampuan dan keahlian masing-masing aparatur pada tingkatan yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya juga masih dirasakan kurang, sehingga mengakibatkan penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, dan belum dapat menganalisis kebutuhan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subyek penelitian secara apa adanya (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-

lain). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nawawi (1991:62) yang mengatakan bahwa: “jenis penelitian deskriptif analisis adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek yang diteliti baik berupa orang, lembaga, masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Lokasi penelitian adalah di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Dengan pertimbangan penulis ingin mengetahui Kinerja Aparat Pemerintah dalam Pelayanan KK dan KTP di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dan tersedianya data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Menurut Moleong (2004:132) “suatu kajian dalam penelitian kualitatif justru telah mengisyaratkan di tetapkannya *Purposive* yaitu peneliti menentukan sendiri orang-orang yang hendak di jadikan subjek satuan kajian penelitian kualitatif/berkelompok”. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun subjek yang menjadi sasaran yang di pilih penulis antara lain: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat dan Tokoh Agama). Alasan penulis memilih mereka sebagai informan adalah karena para informan tersebut adalah juru kunci atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah dilapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu teknik observasi, teknik wawancara. dan teknik dokumentasi. Untuk itu disusun alat pengumpulan data berupa pedoman obserasi, merupakan suatu daftar (objek) yang akan diamati dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, pedoman wawancara yaitu berupa catatan dan pertanyaan mengenai pokok

permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan, dengan alat bantu berupa buku catatan dan tape recorder, dokumentasi merupakan suatu langkah yang digunakan peneliti dengan mengumpulkan data-data penting berupa, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis menurut Purwoko, (1999:39) yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek penelitian. Dapat digambarkan dalam tahap-tahap seperti reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

#### **KINERJA APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

##### **1. Responsivitas Aparat Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.**

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator pelayanan yang memperlihatkan bahwa produk pelayanan yang selama ini dihasilkan oleh aparat pemerintah desa Entikong belum dapat memenuhi harapan pengguna layanan. Responsivitas yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran aparat desa terhadap pelayanan. Dalam masalah distribusi atau

pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan blanko administrasi kependudukan perlu menjadi perhatian, serta adanya tindakan korektif dari atasan baik berupa penghargaan bagi pegawai yang disiplin menjalankan tugas, atau perintah dari atasan kepada bawahan yang sering membolos pada saat jam pelayanan sedang sibuk, perlu di tegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akhirnya hal tersebut akan berdampak kepada disiplin waktu dan disiplin kerja serta berdampak pula kepada kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan kehendak masyarakat, yaitu cepat dan akurat dilihat dari sisi waktu dan proses pemberian pelayanan. Tuntutan-tuntutan terhadap para pemberi pelayanan sering kali muncul sehubungan dengan kurangnya daya tanggap atau perhatian para aparat pemberi pelayanan dalam proses pelayanan publik. Kecuali itu, rutinitas tugas-tugas pelayanan dan penekanan yang berlebihan kepada pertanggung jawaban formal mengakibatkan adanya prosedur yang kaku atau lamban. Kelambanan pelayanan publik tidak hanya di sebabkan oleh kurang baiknya cara memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan tetapi juga disebabkan oleh gaya manajemen yang terlalu berorientasi pada tugas sehingga menyebabkan petugas memberikan layanan menjadi tidak termotivasi untuk menciptakan hasil yang nyata dan kualitas pelayanan publik yang prima.

##### **2. Responsibilitas Aparat Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.**

Kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh staf atau aparat pelayanan kepada warga masyarakat tertentu mempunyai aturan berupa persyaratan dan prosedur yang dijadikan pedoman bagi setiap unit pelayanan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai penggunaan jasa layanan. Kepatuhan aparat akan persyaratan dan prosedur pelayanan guna melaksanakan

prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikatakan tidak konsisten. Tidak konsistennya kepatuhan aparat tersebut karena dalam memberikan pelayanan masih berpegang pada prinsip siapa yang dilayani. Artinya hubungan kekerabatan, hubungan informal, dan pandangan dari segi finansial masih sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Para elit masyarakat yang mempunyai hubungan informal dengan aparat di kantor desa tidak pernah mengetahui tentang persyaratan dan prosedur yang ada seperti harus mengisi formulir biodata penduduk, formulir permohonan kartu keluarga, formulir permohonan KTP terlebih dahulu. Pelayanan yang diberikan aparatur desa masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, sehingga persyaratan dan prosedur tersebut hanya diterapkan bagi masyarakat atau pelanggan yang tidak memiliki akses atau hubungan terhadap petugas, maka prosedur dan waktu pelayanan menjadi sangat rumit ketika ada persyaratan yang belum terpenuhi. Jadi prosedur akan ditaati petugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan jika masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak mempunyai hubungan informal dengan aparat.

### **3. Akuntabilitas Aparat Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.**

Untuk mengetahui seberapa konsisten aparatur desa terhadap kebijakan dalam menjalankan tugas pelayanan KK dan KTP yang mereka berikan kepada masyarakat, maka aparat harus mempunyai tingkat akuntabilitas yang baik pada saat melaksanakan kepada masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dan institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja

di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat serta suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholder* seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan (desa) dapat diketahui bahwa pihaknya belum memberikan sanksi terhadap kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut hal itu dikarenakan belum adanya standar sanksi yang ditetapkan secara resmi jika bawahannya melakukan kesalahan dan kelalaian dalam mengemban tugas pemerintahan. Selama ini aparat desa telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Aparat desa tidak pernah merasa bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya. Pemberian pelayanan yang memakan proses dan prosedur panjang, seperti yang terjadi menjadi indikasi, masih rendahnya akuntabilitas dan pelayanan yang ada.

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, maka diperoleh kesimpulan yaitu mengenai Responsivitas

pelayanan yang aparat desa berikan dirasakan sudah cukup baik karena pelayanan KK dan KTP yang di berikan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga cepat ditanggapi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Walaupun aspirasi yang ditampung kurang cepat ditanggapi, karena adanya kendala yang menghambat pelayanan berupa kesiapan aparat yang masih kurang dalam pengadaan dokumen untuk surat-surat administrasi kependudukan yang terkadang habis. Responsibilitas pelayanan yang diberikan aparat Desa Entikong masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, sehingga persyaratan dan prosedur tersebut hanya diterapkan bagi masyarakat atau pelanggan yang tidak memiliki akses atau hubungan terhadap petugas, maka prosedur dan waktu pelayanan menjadi sangat rumit ketika ada persyaratan yang belum terpenuhi. Jadi prosedur akan ditaati petugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan jika masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak mempunyai hubungan informal dengan aparat. Akuntabilitas pelayanan yang diberikan aparat pemerintah Desa Entikong masih dirasakan kurang konsisten dan kurang merespon apa yang menjadi masalah masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilihat dari berbagai indikator aparat yang sering keluar kantor pada jam-jam kerja, sehingga pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan tersebut terbengkalai.

Dalam hal ini di harapkan adanya diskusi maupun dialog dengan baik yang formal maupun informal karena aparat desa mempunyai ide atau gagasan yang kiranya dapat mendukung kualitas maupun prosedur pelayanan terhadap KK dan KTP. Aparatur pemerintah desa harus lebih merespon apa yang menjadi masalah masyarakat berusaha untuk cepat tanggap terhadap warga yang hendak mengurus segala administrasi kependudukan dan tidak membedakan status sosial. Aparat Pemerintah Desa Entikong

harus menyediakan kesiapan dan kemudahan informasi yang dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengurus KK dan KTP.

## REFERENSI

- Asra. 2007. *Kinerja Aparatur Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori Dan Praktik*. Jakarta : Grasindo Anggota Ikapi.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Purwoko, Bambang. 1999. *Diktat Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta : FISIP Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Yanti, Evi. 2010. *Kinerja Aparatur Desa Di Kantor Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FEBRIANTI NINGSIH  
NIM / Periode lulus : E 21109064  
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
E-mail address/HP : [www.febrianti.ningsih91@yahoo.co.id](mailto:www.febrianti.ningsih91@yahoo.co.id) / 089610690666

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....Publika.....\*) pada Program Studi.....Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

KINERJA APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK  
DI KANTOR DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG  
KABUPATEN SANGGAU.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext  
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....17.12.2013

Dr. Arifin, S. Sos.  
NIP. 1971050219971021002

Dibuat di : Pontianak,  
Pada tanggal: 17 Desember 2013

( Febrianti Ningsih )  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).